



PENIMBUNAN SAMPAH : Pola pembuangan dan penimbunan sampah seperti di TPST Piyungan dianggap tak lagi ideal. Pengelolaan sampah perlu bantuan teknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat. (36)

Perlu Teknologi Mengelola Sampah

■ Pola Penimbunan Tak Ideal

YOGYAKARTA - Penutupan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, membuat warga harus berpikir mengenai pengelolaan secara mandiri. Sebenarnya banyak bank sampah tetapi tidak semuanya aktif bahkan ada yang mati suri.

Pakar lingkungan UGM, Dr Mohammad Pramono Hadi MSC mengungkapkan TPST Piyungan Bantul didesain sekitar 40 tahun lalu dengan luas 16 hektare menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung. Petugas akan memadatkannya

kemudian menimbun dengan tanah. "Pemusatan pengelolaan akhir sampah pada satu lokasi supaya efisien namun memerlukan pihak ketiga untuk mengelolanya," ujar Pramono juga Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Dia menilai ketika TPST Piyungan ditutup, dan pengelolaan sampah dikembalikan ke daerah

membuat warga kelahakan. Penutupan tak lain karena terjadi penumpukan dan karakteristik sampah. Puluhan tahun lalu sampah organik masih dominan tetapi kini lebih banyak sampah anorganik. Desain Riset Saat ini, Pramono dan tim sedang mendesain riset untuk meneliti pengujian kualitas air di sungai-sungai Yogyakarta. Ia menduga lokasi pembuangan sampah yang sudah tidak diperbolehkan akan muncul lagi karena warga kebingungan membuang sampah. "Jangan disalahkan kalau kualitas lingkungan menurun di perkotaan karena memang belum ada solusi pengelolaan sampah akhir," tandasnya. Ia menyarankan pola pengelolaan sampah harus efektif dalam satu kesatuan. Ia tidak merekomendasikan model sanitary landfill karena tidak lagi ideal. Perlu

terobosan mengelola sampah menggunakan teknologi seperti yang sudah dilakukan di berbagai negara. Tak kalah pentingnya menurut Pramono, edukasi pada masyarakat mulai dari mengenalkan jenis-jenis sampah sampai pada pengelolaan secara mandiri. Bahkan dalam literatur tertentu perlu pola berbayar agar masyarakat juga mengetahui bahwa pengelolaan sampah memerlukan biaya tidak sedikit. Konsep sampah berbayar yakni ketika seseorang ingin membuang sampah dengan membayar sedikit maka ia harus mengelola sebagian besar sampahnya sendiri. Hanya sampah tertentu yang bisa dibuang sesuai dengan biayanya. "Jangan pernah lelah melakukan sosialisasi pemilahan sampah secara mandiri. Beri sanksi pembuangan sampah sembarangan, bukan sekadar teguran tapi tindak pidana," tegasnya. (D19-36)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005